

**PERKEMBANGAN KOTA-KOTA KECIL DI KABUPATEN BANYUMAS DAN POTENSI  
PENGUATAN PERANNYA DALAM KETERKAITAN DESA KOTA**  
*THE DEVELOPMENT OF SMALL CITIES IN BANYUMAS REGENCY AND THE POTENTIAL OF  
STRENGTHENING ITS ROLE IN VILLAGE AND CITY LINKAGES*

Diyah Kumala Sari<sup>\*1</sup>, Fadjar Hari Mardiansjah<sup>2</sup>

Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro<sup>1 2</sup>

Jalan Prof. Soedarto, Tembalang, Kota Semarang 50275<sup>1 2</sup>

e-mail\*: diyahkumala12@gmail.com<sup>1</sup>

**ABSTRAK**

Purwokerto merupakan ibukota Kabupaten Banyumas yang berkedudukan sebagai pusat pelayanan untuk kawasan Barlingmascakeb. Jumlah penduduk perkotaan Purwokerto yang mencapai 241.660 jiwa pada tahun 2019, merupakan fenomena pemusatan penduduk yang masif untuk kawasan non-administratif perkotaan. Perkembangan Perkotaan Purwokerto memicu adanya perkembangan kota-kota kecil disekitarnya yang ditandai tingkat urbanisasi di Kabupaten Banyumas sebesar 51,34%, proposi jumlah penduduk perkotaan yang mencapai 39,18%, dan teridentifikasi terdapat 144 desa perkotaan yang membentuk 26 aglomerasi perkotaan pada tahun 2019. Kondisi ini menjadi fenomena menarik dimana kawasan kabupaten dengan mayoritas penduduk agraris, namun memiliki perkembangan kawasan perkotaan yang tinggi. Perkembangan kawasan perkotaan di wilayah kabupaten memiliki potensi peran dalam peningkatan perekonomian wilayah sebagai jembatan aktivitas yang memperkuat ketarkaitan desa kota. Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis perkembangan kota-kota kecil di Kabupaten Banyumas dan mengetahui bagaimana potensi peningkatan perannya dalam memperkuat keterkaitan desa kota. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus yang berbasis pada data sekunder dan menggunakan teknik analisis deskriptif, skalogram dan ISM, location quotient dan network analysis. Hasil penelitian menunjukkan perkembangan perkotaan di Kabupaten Banyumas terjadi hampir di seluruh wilayah kabupaten. Teridentifikasi terdapat satu kota sedang, lima kota kecil, serta dua puluh kota kecamatan yang berkembang. Namun keberadaan kota-kota kecil tersebut belum sepenuhnya mampu menyediakan fasilitas pendukung bagi aktivitas perdesaan. Umumnya, kota-kota kecil yang ada hanya dikembangkan sebagai kawasan pelayanan umum yang mampu melayani kawasan perkotaan serta kawasan lain di sekitarnya, dan belum diarahkan menjadi pusat pendukung pengembangan aktivitas perdesaan. Sehingga untuk meningkatkan penguatan potensi perannya dalam kebijakan dan strategi pembangunan wilayahnya perlu menambahkan pengembangan fasilitas di kawasan-kawasan perkotaan, agar mampu menjadikan kawasan-kawasan tersebut sebagai kawasan penyedia fasilitas pendukung sekaligus sebagai pusat transformasi produksi ekonomi bagi kawasan pertanian perdesaan di sekitarnya terutama di dalam upaya memperkuat keterkaitan desa kota di Kabupaten Banyumas.

*Kata Kunci : keterkaitan desa kota, perkembangan kota kecil, peran kota kecil, urbanisasi wilayah.*

**ABSTRACT**

*Purwokerto, the capital city of Banyumas Regency, has roles as a services center for Barlingmascakeb area. In 2019, the human population reached 241.660, and it was a massive human concentration phenomenon in non-urban administrative areas. The phenomenon led to the development of the small town in its surroundings, with the urbanization level of this regency reaching 49.6% by the existence of 144 urbanized villages and forming 26 urban agglomerations. This issue became an attractive phenomenon when the region area, which has the majority of the population being agricultural, had high urban area development rates. The growth of urban agglomerations as small towns has potential roles in increasing economic levels as a bridge that strengthens rural-urban interaction. This paper aims to analyze the development of the towns in Banyumas Regency and investigate the potential improvement to increase their potential roles in strengthening rural-urban interactions. The research uses a qualitative approach with a case study based on secondary data. Furthermore, it uses a few analysis techniques: statistic descriptive, scalogram and central index, location quotient and spatial network analysis. The results show that the growth of towns is scattered in almost all of the territory, with the growth of one medium-sized city-like town, five small-size towns, and twenty district towns. However, the growth of the towns could only partially provide supporting facilities for rural activities. Mainly the growing towns are developed as social service centers for the towns and the surroundings and have not yet been directed as rural economic activities' support centers. Therefore, the improvement and strengthening of their roles need to involve the development of certain facilities in the towns so they can play as supporting centers and transformation centers for the rural production activities for its surrounding to strengthen rural-urban interaction in its territory.*

*Keywords: regional urbanization, small town's roles, rural-urban interactions, small town development.*

<sup>1</sup> Naskah diterima : Maret 2022

Naskah disetujui : Agustus 2022

DOI : <https://doi.org/10.21776/ub.takoda.2022.014.02.8>

## PENDAHULUAN

Urbanisasi merupakan sebuah proses penciptaan perkotaan yang diikuti dengan proses perluasan ruang perkotaan dan peningkatan konsentrasi penduduk (Merlin & Choay, dalam Mardiansjah et al., 2018). UNDESA (2018) menyatakan bahwa dari 55% penduduk bumi bertempat tinggal di kawasan perkotaan, hanya 17,7% penduduk yang teraglomerasi di dalam *megacity* dan porsi terbesar berada pada kota-kota serta kawasan-kawasan perkotaan kecil. Urbanisasi menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi Indonesia di mana menurut Kanbur & Zhuang (2013), urbanisasi di Indonesia menyumbang lebih dari 50% kesenjangan tingkat nasional.

Kota kecil merupakan sebuah aglomerasi perkotaan yang memenuhi syarat jumlah penduduk minimum, yang telah mengalami pengurangan peran aktivitas pertanian dan memiliki peran pengaruh ke kawasan di sekitarnya (Filipovic et al., 2016). Dalam konteks di Indonesia, Mardiansjah et al., (2021) menjelaskan bahwa terdapat dua jenis kota-kota kecil yang berkembang di Indonesia, yaitu kota-kota kecil yang bersifat kota otonom (daerah kota) dan kawasan-kawasan perkotaan kecil tanpa status yang berkembang di wilayah kabupaten. Kota-kota kecil di wilayah kabupaten tumbuh dan berkembang dari gabungan desa-desa yang telah memiliki karakter perkotaan, yang biasa disebut sebagai desa perkotaan. Desa-desa perkotaan diklasifikasikan berdasarkan tiga variabel utama, yaitu proporsi keluarga nonpertanian, tingkat kepadatan penduduk, dan keberadaan sejumlah sarana prasarana perkotaan tertentu (BPS, 2010).

Perkembangan urbanisasi di Indonesia memperlihatkan besarnya peranan kota-kota kecil tanpa status yang berkembang di wilayah kabupaten, sebagai ruang hidup dari penduduk perkotaan Indonesia (Mardiansjah et al., 2021). Mardiansjah et al., (2021) memperlihatkan bahwa proporsi penduduk perkotaan di wilayah kabupaten telah meningkat dari hanya 5,9 juta di tahun 1971 menjadi 66,1 juta di tahun 2010. Secara proporsi, penduduk perkotaan di wilayah kabupaten-kabupaten meningkat dari 28,5% menjadi 55,8% pada periode yang sama, yang berarti menurunkan proporsinya yang

berada di daerah-daerah kota dari 71,5% menjadi hanya 44,2% (Mardiansjah et al., 2021)

Perkembangan kota-kota kecil di kawasan pedesaan berpotensi menjadi *trigger* bagi perkembangan kawasan pedesaan karena perkembangannya jauh lebih cepat daripada kota besar (Fahmi et al., 2014). Sietchiping et al., (2014) menjelaskan beberapa peran penting dari kota-kota kecil dalam meningkatkan keterkaitan desa-kota untuk pengembangan urbanisasi berkelanjutan, yakni sebagai pusat-pusat distribusi penduduk perkotaan termasuk sebagai satelit dari kota lain yang berorde lebih tinggi, pusat pelayanan administrasi politik dan pengembangan tata kelola kawasan, pusat pelayanan pemenuhan kebutuhan wilayah, pusat pemasaran dan pertumbuhan ekonomi wilayah, pusat penguatan ketahanan pangan, pusat pelayanan sosial, budaya dan rekreasi wilayah, serta pusat-pusat koneksi di dalam jejaring interaksi aktivitas sosial, ekonomi, dan termasuk aktivitas-aktivitas produksi yang berupa aktivitas fisik, dan pusat-pusat pengembangan resiliensi / daya tahan yang dibutuhkan untuk meningkatkan ketangguhan kawasan. Selain itu, Tacoli (2017) juga menyebutkan bahwa kota-kota kecil memiliki peran penting sebagai pusat permintaan pasar bagi produk pertanian dan aktivitas pedesaan, pusat produksi dan distribusi barang dan jasa yang dibutuhkan bagi kawasan sekitarnya, pusat pertumbuhan, konsolidasi dan transformasi tenaga kerja dan aktivitas-aktivitas pertanian dan non-pertanian, pusat konsentrasi migrasi dari wilayah sekitar, dan pusat pengelolaan dan pengembangan tata kelola sumber-sumber daya alam di wilayah sekitar.

Dengan demikian, kota-kota kecil memainkan peran penting dalam memfasilitasi hubungan antara kawasan perkotaan dan pedesaan (Braun, 2007). Selain menjadi penyambung alur keterkaitan desa-kota, kota-kota kecil juga berperan sebagai pengelola hasil pertanian yang akan meningkatkan nilai tambah dan memperluas pasar dari barang produksi pertanian. Braun (2007) menyatakan bahwa adanya keterkaitan yang kuat antara kawasan perkotaan dan pedesaan dapat meningkatkan pertumbuhan wilayah karena keterkaitan ini memfasilitasi aliran sumber daya ke tempat atau lokasi yang memiliki nilai manfaat sosial dan ekonomi yang lebih besar.

Pola urbanisasi saat ini telah berubah, di mana kota-kota tidak hanya mengalami pertumbuhan populasi dalam batasan wilayahnya sendiri, tetapi juga berpotensi memperluas proses urbanisasi ke kawasan sekitarnya, dan bahkan menciptakan kawasan perkotaan yang baru, (Yue et al., 2013). Perkembangan kota-kota kecil di Indonesia terbentuk oleh adanya konfigurasi desa kota di mana adanya fungsi-fungsi perkotaan di kawasan pedesaan yang dipicu oleh perkembangan kegiatan sosial dan ekonomi (Setyono et al., 2016). Perkembangan kota kecil diindikasikan dari adanya peningkatan urbanisasi yang ditujukan dengan semakin meningkatnya proporsi jumlah penduduk perkotaan terhadap jumlah penduduk totalnya (Mardiansjah & Rahayu, 2020). Perkembangan kota kecil berhubungan dengan perkembangan pusat pelayanan dalam suatu wilayah regional (Gaffara & Fathur, 2015). Mardiansjah et al., (2018) menyatakan bahwa pertumbuhan perkotaan di wilayah kabupaten dapat dilihat dari adanya perubahan jumlah desa perkotaan dan jumlah aglomerasi desa-desa perkotaan tersebut.

Salah satu wilayah yang mengalami percepatan urbanisasi dan memiliki banyak kota-kota kecil adalah Kabupaten Banyumas yang menjadi pusat utama di dalam Wilayah Pembangunan Barlingmascakeb. Kabupaten Banyumas, yang dahulunya merupakan wilayah perkembangan pertanian pedesaan, mengalami pertumbuhan penduduk yang meningkat dari tahun ke tahun. Pertambahan jumlah penduduk ini mayoritas terjadi di kawasan yang menjadi pusat pelayanan baik di skala kabupaten maupun kecamatan. Pertumbuhan penduduk yang terjadi berdampak pada peningkatan kepadatan penduduk dan aktivitas yang ada, sehingga mengubah beberapa desa tertentu menjadi desa-desa yang terkategori sebagai desa perkotaan, sebagai bagian dari pertumbuhan dan perkembangan kawasan perkotaan.

Sementara itu, Kabupaten Banyumas sendiri merupakan kawasan yang masih menjadikan aktivitas pedesaan yakni pertanian (Rahayu, 2016), industri pariwisata (Hermawati & Milawaty, 2016), serta pertambangan (Haryadi, 2010; Pohan et al., 2007) menjadi aktivitas utama masyarakat. Hal tersebut ditunjukkan dengan sumbangan sektor-sektor tersebut yang tinggi dalam PDRB ataupun

PAD. Perkembangan aktivitas pedesaan dan perkembangan perkotaan yang berbarengan ini menjadi sebuah tantangan dalam perkembangan wilayah dalam menciptakan hubungan keterkaitan desa-kota yang kuat. Keterkaitan desa-kota merupakan sebuah konsep pengembangan wilayah yang menitikberatkan pada adanya keseimbangan antara kawasan perkotaan dan pedesaan dalam menjalankan fungsinya untuk kegiatan ekonomi, sosial, dan sebagainya (Pratomo & Wijayanti, 2019).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini ditujukan untuk menjawab pertanyaan mengenai bagaimana perkembangan kota-kota kecil di Kabupaten Banyumas dalam memanfaatkan potensi perannya untuk mendukung perkembangan aktivitas pedesaan disekitarnya dalam konteks keterkaitan desa kota. Hasil penelitian akan menunjukkan bagaimana perkembangan kota-kota kecil di Kabupaten Banyumas, bagaimana potensi aktivitas pedesaan di Kabupaten Banyumas, serta bagaimana peran dari kota-kota kecil di Kabupaten Banyumas dalam mendukung perkembangan potensi aktivitas pedesaan dalam konteks keterkaitan desa kota.

## METODE

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang berbasis studi kasus Penelitian dilakukan pada lingkup kecamatan di seluruh Kabupaten Banyumas yang terdiri atas 27 kecamatan, 301 desa dan 30 kelurahan dengan luas 1.327,60 km<sup>2</sup>.

### Variabel Penelitian

Variabel dalam penelitian ini menggunakan data sekunder berupa data shapefile dan data statistik. Unit data yang digunakan adalah wilayah kecamatan, Adapun untuk analisis perkembangan kota-kota kecil menggunakan unit data desa/atau kelurahan. Variabel penelitian tersaji pada **Tabel 1**.

**Tabel 1.** Variabel Penelitian

No	Sasaran	Variabel	Sumber
1	Analisis Perkembangan Kota-kota Kecil di Kabupaten Banyumas	Status Desa Perkotaan	Peraturan Kepala BPS No. 37 Tahun 2010, (Arsandi et al., 2017; Mardiansjah & Rahayu, 2019, 2020; Setyono et al., 2016)
Kependudukan			
Kepusatan Wilayah			
Aksesibilitas			

No	Sasaran	Variabel	Sumber
2	Identifikasi Potensi Pengembangan Aktivitas Perdesaan di Kabupaten Banyumas	Aktivitas Pertanian	
		Jenis Aktivitas Pertanian	(Epon, 2014; Iksan et al., 2015; Kusuma & Ma'rif, 2015; Li et al., 2019;
		Sumber Daya Manusia	Pratomo & Wijayanti, 2019)
		Fasilitas Pendukung	
		Aktivitas Pariwisata	
		Jenis Aktivitas Pariwisata	(Atmoko, 2014; Way et al., 2016)
		Fasilitas Pendukung	
		Aktivitas Perindustrian	
		Jenis Aktivitas Perindustrian	(Anjaningrum & Cahyanti, 2017; Rachmawati & Amir, 2003; Thessa & Mudianto, 2017)
		Fasilitas Pendukung	
3	Analisis Potensi Peran Kota Kecil dalam Penguatan Keterkaitan Desa Kota	Aktivitas Pertanian	(Filipovic et al., 2016; Pratomo & Wijayanti, 2019; Sietchiping et al., 2014)
		Aktivitas Pariwisata	
		Aktivitas Perindustrian	
		Aktivitas Administrasi dan Pendidikan	
		Potensi Sumber Daya Tenaga Kerja	(Ansori & Hastria, 2012; Haryadi, 2010; Pohan et al., 2007)

### Metode Analisis Data

#### a) Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif dilakukan dengan mendeskripsikan atau menggambarkan data menjadi lebih ringkas dan informatif. Seluruh data dan analisis yang ada akan dianalisis secara statistik deskriptif.

#### b) Analisis Skalogram dan Indeks Sentralitas Marshall

Analisis Skalogram dan Indeks Sentralitas Marshall (ISM) digunakan untuk mengidentifikasi pusat-pusat layanan berdasarkan jumlah fasilitas yang dimiliki di setiap kawasan. Analisis ini dilakukan dengan prosedur:

1. Identifikasi seluruh fasilitas di Kabupaten Banyumas per kecamatan dan diurutkan berdasarkan kecamatan yang memiliki jumlah fasilitas tertinggi.
2. Identifikasi ketersediaan fasilitas dengan memberi tanda (1) untuk menandakan keberadaan suatu fasilitas dan tanda (0) untuk menyatakan ketiadaan suatu fasilitas.
3. Urutkan kembali tabel data berdasarkan frekuensi keberadaan fasilitas yang sudah diidentifikasi sebelumnya.
4. Menentukan *error* dengan Metode Goodenough dengan menentukan pola prediksi setiap skor total. Pola prediksi yang digunakan adalah  $X_n = 11, \dots, 1, X_{n-1} = 11, \dots, 0$ , dst.

5. Menentukan kelayakan skalogram dengan *Coefficient of Reproducibility* (COR) dengan rumus

$$COR = 1 - \frac{\sum E}{N \times k}$$

Keterangan:

COR : *Coefficient of Reproducibility*/ Nilai Kelayakan

$\sum E$  : jumlah eror dari seluruh data

N : jumlah kecamatan

K : jumlah jenis fasilitas

Apabila nilai  $COR \geq 0,9$  maka koefisien dianggap layak

6. Melakukan klasifikasi/orde pusat layanan, n = jumlah kecamatan

$$Jumlah\ kelas = 1 + 3,3 \log n$$

$$Interval = \frac{(Jumlah\ Total\ skor\ tertinggi - jumlah\ total\ skor\ terendah)}{jumlah\ kelas}$$

Untuk analisis Indeks Sentralitas Marshall (ISM) klasifikasi orde didasarkan pada besar total bobot fasilitas. Pembobotan dilakukan dengan rumus

$$C = \frac{t}{T}$$

C : Bobot dari atribut fungsional suatu fasilitas

t : nilai sentralitas gabungan, dalam hal ini dianggap 100

T : jumlah total fasilitas pada setiap jenis

#### c) Analisis *Location Quotient* (LQ)

Analisis *Location Quotient* (LQ) merupakan salah satu pendekatan analisis untuk mengidentifikasi komoditas unggulan dan berpotensi. Analisis LQ pada penelitian ini akan dilakukan untuk menganalisis komoditas aktivitas pertanian di Kabupaten Banyumas. Jenis LQ yang digunakan adalah *Static Location Quotient* (SLQ) dengan rumus

$$SLQ = \frac{X_r/RV_r}{X_n/RV_n}$$

Keterangan:

SLQ : Besaran koefisien lokasi komoditas pertanian

Xr : Jumlah (produksi) komoditas i pada setiap kecamatan

RVr : Jumlah total (produksi) komoditas pertanian di tingkat kecamatan

XN : Jumlah (produksi) komoditas i pada tingkat kabupaten

RVn : Jumlah total (produksi) komoditas pertanian di tingkat kabupaten

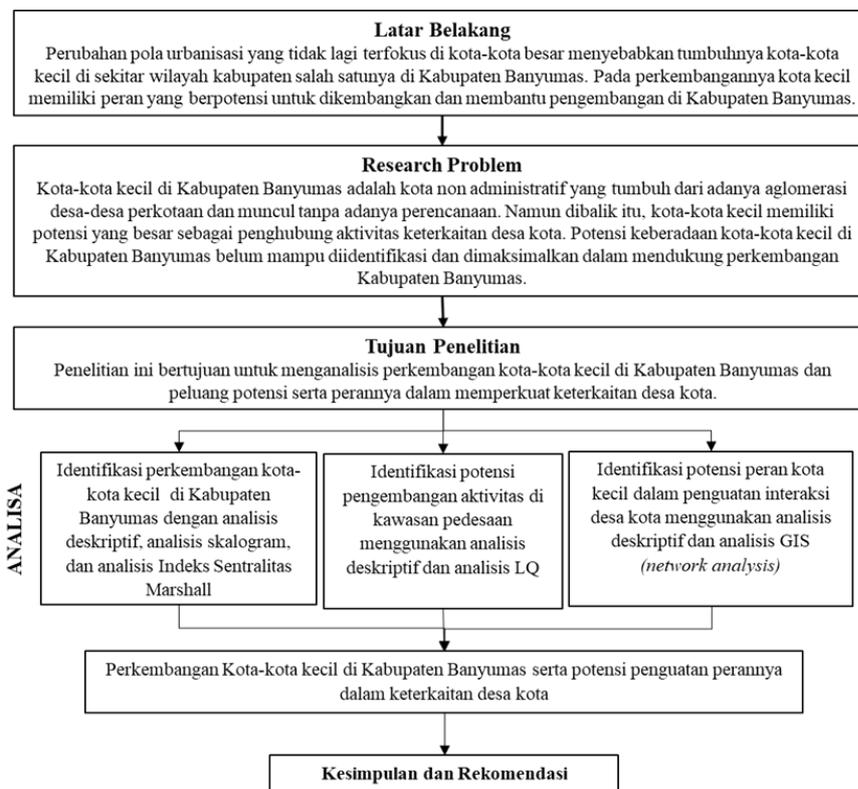
komoditas tersebut

d) Analisis Spasial *Network Analysis*

Analisis spasial *network analysis* pada penelitian ini dilakukan untuk menganalisis jangkauan pelayanan dari fasilitas perkotaan. *Network Analysis* merupakan pemodelan transportasi untuk melihat hubungan antar objek yang dihubungkan dengan jaringan transportasi. Pada penelitian ini model yang digunakan adalah *Service Area*. *Service Area* merupakan pendekatan untuk menemukan area yang dapat diakses dari suatu titik sarana pada suatu jaringan. Data yang digunakan adalah data titik lokasi fasilitas perkotaan, data jaringan jalan dengan format .shp dan data standar pelayanan baik berupa jarak lokasi ataupun waktu tempuh.

Kondisi yang dihasilkan dari perhitungan SLQ

- SLQ > 1, komoditas unggulan yang mana selain sudah mampu memenuhi kebutuhan wilayahnya sendiri juga memiliki potensi untuk diekspor ke wilayah lain. Wilayah tersebut dapat di spesialisasi basis pada komoditas tersebut
- SLQ = 1, komoditas yang hanya mampu untuk memenuhi kebutuhannya sendiri
- SLQ < 1, bukan unggulan, wilayah tersebut tidak terspesialisasi terhadap



Gambar 1. Kerangka Analisis

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Kawasan Perkotaan yang Tumbuh dan Berkembang**

Analisis perkembangan kota-kota kecil di Kabupaten Banyumas berkaitan erat dengan ukuran penduduk perkotaan dan nilai kepusatan kawasan perkotaan. Perkembangan ini

ditujukan dengan peningkatan desa perkotaan dari 69 desa di tahun 1990 menjadi 144 desa di tahun 2019. Pertumbuhan kawasan perkotaan berkaitan erat dengan pertumbuhan penduduknya yang dapat diketahui dari peningkatan jumlah penduduk perkotaan dan perubahan tingkat urbanisasi wilayahnya (Satterthwaite et al., 2010). Peningkatan perkotaan tertinggi terjadi pada tahun 2010,

yang turut mengukuhkan kabupaten ini sebagai kabupaten yang terurbanisasi (*urbanized kabupaten*) dengan tingkat urbanisasi sebesar 53,58%, yang artinya lebih dari setengah jumlah penduduk di kabupAten ini terkategori sebagai penduduk yang bertempat tinggal pada kawasan-kawasan perkotaan.

Peningkatan jumlah penduduk perkotaan yang signifikan yakni sebesar 387.002 penduduk dalam kurun waktu 10 tahun, dari 445.904 di tahun 2000 menjadi 832.906 di tahun 2010. Peningkatan jumlah penduduk perkotaan yang signifikan erat kaitannya dengan adanya kebijakan otonomi daerah yang mulai berlaku sejak tahun 2000 (Mardiansjah et al., 2021). Tingkat urbanisasi tertinggi di Kabupaten Banyumas terjadi di kawasan Perkotaan Purwokerto yang terdiri atas Kecamatan Purwokerto Timur, Purwokerto Selatan, Purwokerto Barat, dan Purwokerto Utara. Sementara itu, terdapat 3 (tiga) kecamatan di Kabupaten Banyumas yang masih tergolong pedesaan di mana sama sekali belum ada kawasannya yang terklasifikasi sebagai kawasan perkotaan yakni di Kecamatan Lumir, Kecamatan Purwojati, dan Kecamatan Gumelar.

Perkembangan desa-desa perkotaan dapat membentuk aglomerasi perkotaan (Marjanovic-Uzealac dalam (Filipovic et al., 2016) yang menjadikan adanya peningkatan konsentrasi perkotaan di Kabupaten Banyumas seperti yang ditunjukkan dalam **Tabel 2**. Pada tahun 1990 dan 2000 teridentifikasi terdapat 17 kawasan perkotaan, yang bertambah menjadi 26 kawasan perkotaan pada tahun 2010 dan 2019. Terdapat peningkatan 8 kawasan perkotaan dalam rentang waktu tersebut.

**Tabel 2.** Jumlah Konsentrasi Perkotaan di Kabupaten Banyumas

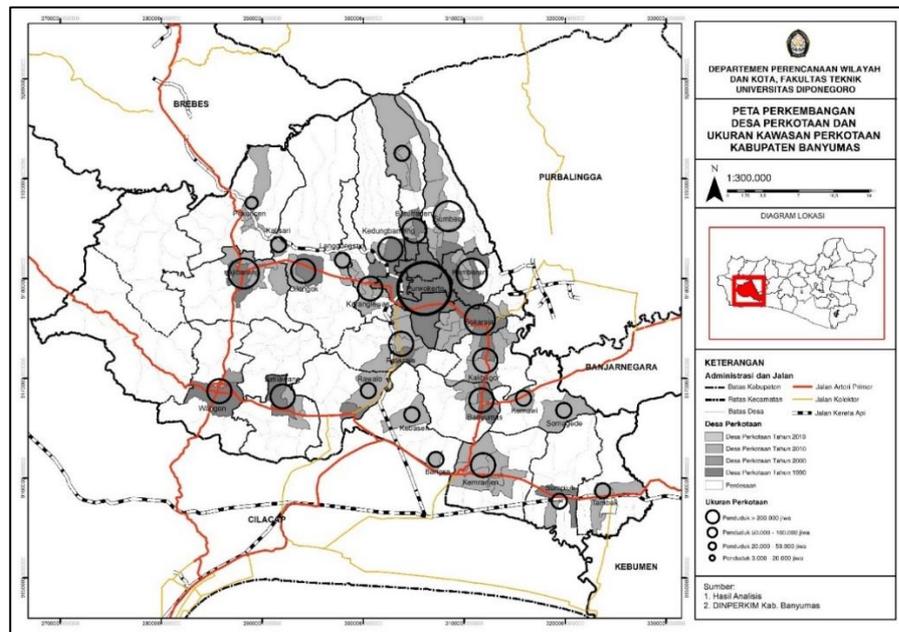
Penduduk Perkotaan	1990	2000	2010	2019
> 200.000 jiwa	1	1	1	1
100.000-200.000 jiwa	0	0	0	0
50.000-100.000 jiwa	0	0	2	4
20.000-50.000 jiwa	3	3	11	10
3.000-20.000 jiwa	13	13	12	11
Konsentrasi perkotaan	17	17	26	26

Sumber: Diolah dari Data Sensus Penduduk Tahun 1990 dan 200, Data Master Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 dan 2019, Kabupaten Banyumas Dalam Angka

Hasil analisis menunjukkan bahwa KP Purwokerto merupakan kawasan perkotaan yang cukup besar, dengan memiliki ukuran lebih dari 200.000 jiwa penduduk sejak tahun 1990. Jumlah ini bahkan hampir sama dengan Kota Pekalongan dan Kota Tegal yang secara administratif berstatus sebagai kota otonom. Perkembangan KP Purwokerto tidak lepas dari peran KP Purwokerto sebagai kawasan pusat pelayanan utama dari Kawasan Regional Barlingmascakeb, yang menyebabkan perkembangan perkotaannya cepat walaupun KP Purwokerto bukanlah kawasan perkotaan yang dekat dengan kawasan kota administrasi yang berukuran besar.

Selain itu Kabupaten Banyumas juga memiliki (4) kawasan perkotaan yang memiliki jumlah penduduk perkotaan di antara 50.000 hingga 100.000 jiwa pada tahun 2019, yakni Perkotaan Sokaraja, Perkotaan Kembaran, Perkotaan Sumbang dan Perkotaan Ajibarang. Dari keempat kawasan perkotaan tersebut hanya Perkotaan Ajibarang yang tidak berbatasan langsung dengan Perkotaan Purwokerto. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan Perkotaan Purwokerto berdampak pada perkembangan kawasan di sekitarnya, seperti yang terjadi pada perkembangan dari Kota Tegal (Mardiansjah, 2020) dan Kota Pekalongan (Mardiansjah dan Rahayu, 2020). Melihat fenomena perkembangan tersebut, terdapat kemungkinan bahwa aglomerasi Perkotaan Purwokerto di masa depan dapat berkembang menjadi lebih besar dan bergabung dengan kawasan-kawasan perkotaan kecil di sekitarnya. Secara spasial ukuran perkotaan di Kabupaten Banyumas tersaji dalam **Gambar 2**.

Analisis kepusatan untuk setiap kawasan perkotaan di Kabupaten Banyumas menunjukkan hasil yang fluktuatif pada tahun 1990, 2000, 2010, dan 2019, dengan hanya Kawasan Perkotaan Purwokerto yang menjadi kawasan perkotaan dengan nilai kepusatan yang tertinggi pada seluruh tahun pengamatan. Kondisi tersebut disebabkan kedudukannya sebagai Ibukota Kabupaten Banyumas yang menjadikan seluruh aktivitas pelayanan sosial maupun ekonomi berpusat pada Perkotaan Purwokerto.



**Gambar 2.** Perkembangan Desa Perkotaan Tahun 1990, 2000, 2010, dan 2019 serta Ukuran Perkotaan di Kabupaten Banyumas

Hasil analisis pada tahun 1990 menunjukkan terdapat dua (2) kawasan perkotaan yang menempati orde II yakni KP Kemranjen dan KP Sumpiuh. Selanjutnya untuk hasil pada tahun 2000 terjadi peningkatan jumlah kawasan perkotaan yang memiliki nilai kepusatan orde II yakni KP Wangon, KP Banyumas, KP Sokaraja, KP Baturraden, KP Kebasen dan KP Sumpiuh. Sementara KP Kemranjen mengalami penurunan nilai kepusatan, hal ini dikarenakan terdapat peningkatan nilai perkotaan di daerah lain seperti peningkatan aktivitas pariwisata di KP Baturraden dan perkembangan aktivitas perdagangan dan jasa di KP Wangon, KP Sokaraja, dan KP Banyumas.

Perkembangan pusat pelayanan di Kabupaten Banyumas pada tahun 2010 menunjukkan hasil yang sedikit berbeda dari tahun 2000. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh adanya kebijakan otonomi daerah dan perkembangan aktivitas perekonomian baru di simpul-simpul pergerakan baru. Hasil analisis menunjukkan terdapat 4 kawasan perkotaan yang menempati orde II yakni KP Sokaraja, KP Wangon, KP Sumpiuh, dan KP Ajibarang. Hasil ini sesuai dengan arahan RTRW Kabupaten Banyumas Tahun 2011-2031 di mana kawasan-kawasan ini memiliki peran sebagai PKL (Pusat Kegiatan Lokal) yang menempati hierarki di bawah Perkotaan Purwokerto.

Sementara itu hasil analisis pada tahun 2019 menunjukkan KP Wangon, KP Sumpiuh, KP Baturraden, KP Sokaraja, dan KP Somagede menunjukkan kedudukannya sebagai pusat

pelayanan di bawah KP Purwokerto. Terdapat kawasan perkotaan yang mengalami penurunan orde yakni KP Ajibarang, namun kondisi tersebut hanya diakibatkan adanya komparasi jumlah fasilitas perkotaan yang lebih kecil dibandingkan dengan kawasan perkotaan lain dengan orde yang lebih tinggi. Namun KP Ajibarang tetap menjadi pusat pelayanan bagi kawasan banyumas bagian barat-utara,

Salah satu faktor pendukung perkembangan kawasan perkotaan adalah keberadaan akses jalan yang memicu tumbuhnya simpul pergerakan. Kawasan-kawasan yang menjadi simpul pergerakan ini cenderung memiliki perkembangan yang lebih cepat dibandingkan dengan kawasan sekitarnya. Hal tersebut dapat diidentifikasi bahwa kawasan-kawasan yang dilewati jalan regional sudah teridentifikasi sebagai kawasan perkotaan. Hasil analisis menunjukkan bahwa kawasan-kawasan yang didukung lebih dari 1 akses jaringan jalan regional dan berjarak  $\geq 20$  km dari Perkotaan Purwokerto seperti Kecamatan Ajibarang, Kecamatan Wangon, Kecamatan Rawalo, dan Kecamatan Kemranjen yang berpotensi menjadi pusat aktivitas baru di Kabupaten Banyumas.

Berdasarkan ukuran perkotaan, nilai kepusatan wilayah, serta ketersediaan akses jalan regional dapat teridentifikasi kawasan-kawasan perkotaan yang dapat dikategorikan sebagai kota kecil, walaupun Kawasan Perkotaan Purwokerto sudah dapat dikategorikan sebagai kota sedang atau menengah, karena jumlah penduduknya

sudah mencapai lebih dari 200.000 jiwa, yaitu 241.660 di tahun 2019. Pada tahun 1990 dan 2000 teridentifikasi terdapat 2 (dua) kota kecil yakni Perkotaan Sokaraja dan Perkotaan Wangon. Selanjutnya pada tahun 2010 teridentifikasi terdapat 3 (tiga) kota kecil yakni Perkotaan Ajibarang, Perkotaan Wangon, dan Perkotaan Kemranjen. Sementara itu hasil pada tahun 2019 menunjukkan terdapat 5 (lima) kota kecil yakni Perkotaan Sokaraja, Perkotaan Banyumas, Perkotaan Kemranjen, Perkotaan Wangon, dan Perkotaan Ajibarang.

### **Aktivitas Perdesaan yang Berkembang**

Aktivitas perdesaan yang berkembang dan menjadi aktivitas utama dari mayoritas penduduk di Kabupaten Banyumas adalah aktivitas pertanian, pariwisata, industri, dan pertambangan. Berdasarkan hasil analisis LQ dan *Shiftshare*, keempat aktivitas tersebut menyebar hampir di seluruh kecamatan dan perlu adanya penyediaan fasilitas pendukung dalam upaya peningkatan potensi aktivitas.

Aktivitas pertanian yang berkembang di Kabupaten Banyumas terdiri atas pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan (Atmoko, 2014; Haryadi, 2010; Rachmawati & Amir, 2007). Hasil analisis menunjukkan bahwa seluruh kecamatan di Kabupaten Banyumas memiliki potensi komoditas pertanian, dengan variasi jenis komoditas yang membedakan antar-kawasan. Jenis komoditas pertanian yang terdapat di Kabupaten Banyumas yakni tanaman pangan seperti padi, jagung, dan kedelai, tanaman hortikultura seperti mangga, pisang, dan durian, tanaman perkebunan seperti kelapa dan tebu, sektor perikanan baik budidaya maupun tangkap serta peternakan berupa sapi potong, ayam, kambing, dan itik.

Potensi komoditas pertanian yang terdapat di Kabupaten Banyumas secara umum sudah didukung oleh ketersediaan fasilitas pendukung seperti tempat pembenihan, tempat pemotongan hewan, dan fasilitas penjualan khusus. Selain itu juga tersedia dukungan sumber daya manusia dan kelembagaan seperti kelompok tani dan kegiatan UMKM pertanian.

Pariwisata merupakan salah satu aktivitas dengan potensi tinggi di Kabupaten Banyumas. Menurut Dinporabudpar Kabupaten Banyumas pada tahun 2020 terdapat 127 tempat wisata dan enam (6) diantaranya menjadi tanggungjawab pemerintah daerah. Hasil analisis menunjukkan bahwa mayoritas kecamatan di Kabupaten Banyumas memiliki potensi aktivitas pariwisata kecuali Kecamatan Tambak dan Kecamatan

Patikraja. Potensi pariwisata di setiap kecamatan sudah didukung dengan ketersediaan fasilitas penunjang seperti hotel dan juga ketersediaan akses sarana transportasi berupa stasiun kereta api ataupun terminal bus.

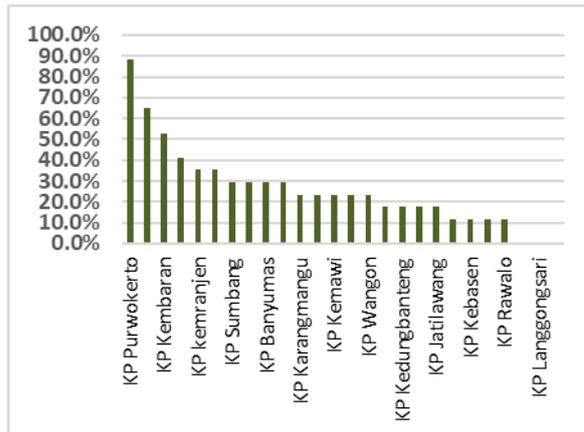
Sama halnya dengan potensi aktivitas perindustrian yang mulai tumbuh dan berkembang di kawasan perdesaan Kabupaten Banyumas. Pada periode tahun 2009-2019 jumlah industri mengalami peningkatan besar terutama untuk jenis industri kecil dan rumah tangga. Selain itu terdapat pemindahan beberapa lokasi industri di pusat Perkotaan Purwokerto menuju beberapa kecamatan lain seperti Kecamatan Wangon, Ajibarang, dan Cilongok yang secara RTRW Kabupaten Banyumas memang diperuntukan sebagai lokasi industri besar. Disisi lain perkembangan aktivitas perindustrian di Kabupaten Banyumas sudah didukung dengan keberadaan fasilitas penunjang permodalan seperti bank dan koperasi serta fasilitas pemasaran seperti pasar dan minimarket. Perkembangan aktivitas industri kecil dan menengah di Kabupaten Banyumas berdampak pada tumbuhnya kawasan komersil seperti yang berkembang di KP Sokaraja, KP Wangon, dan KP Ajibarang. Aktivitas industri di seluruh kecamatan juga sudah didukung oleh adanya pengelolaan oleh UMKM yang secara nyata meningkatkan nilai jual dari produk hasil perindustrian.

Selanjutnya untuk potensi aktivitas pertambangan dan penggalian menunjukkan hasil yang sedikit berbeda dengan aktivitas perdesaan lainnya. Potensi aktivitas pertambangan dan penggalian tidak terdapat pada seluruh kawasan melainkan hanya di bagian selatan dan barat Kabupaten Banyumas. Hal tersebut dipengaruhi oleh bentang alam di Kabupaten Banyumas bagian selatan yang dilewati oleh Perbukitan Serayu (Jannah, 2020). Kecamatan yang memiliki potensi komoditas pertambangan dengan hasil tambang galian tipe C berupa basalt, andesit, sirtu, dan tanah urug yakni Kecamatan Lumbir, Wangon, Jatilawang, Patikraja, Kebasen, Banyumas, Kalibagor, dan Ajibarang.

Hasil analisis potensi aktivitas perdesaan di Kabupaten Banyumas menunjukkan bahwa seluruh kecamatan di Kabupaten Banyumas masih mengandalkan pertanian sebagai aktivitas utamanya. Namun sebagai pengaruh kondisi fisik alam menjadikan potensi setiap kecamatan berbeda. Ketersediaan fasilitas pendukung juga menjadi faktor penting yang mampu mendorong potensi-potensi aktivitas perdesaan dapat berkembang.

### Peluang Peningkatan Peran Kota-kota Kecil dalam Keterkaitan Desa Kota

Kawasan perkotaan yang tumbuh dan berkembang di Kabupaten Banyumas berperan sebagai pusat pelayanan bagi kawasan di sekitarnya termasuk kawasan perdesaan. Berdasarkan hasil analisis ketersediaan fasilitas di kawasan perkotaan serta analisis potensi aktivitas perdesaan, dapat diketahui bahwa kawasan-kawasan perkotaan di Kabupaten Banyumas sudah mampu berperan sebagai penyedia fasilitas pendukung bagi aktivitas perdesaan.



**Gambar 3.** Grafik Persentase Peran Kawasan Perkotaan dalam Penyediaan Fasilitas Pendukung Aktivitas Perdesaan

Seperti yang ditunjukkan dalam **Gambar 3.** diketahui bahwa seluruh kawasan perkotaan sudah berperan sebagai penyedia beberapa fasilitas pendukung aktivitas perdesaan. Namun berdasarkan hasil analisis jangkauan pelayanan seperti yang tersaji dalam **Gambar 4.** dapat diketahui berdasarkan 17 jenis fasilitas pendukung yang telah diidentifikasi, mayoritas kawasan perkotaan di Kabupaten Banyumas hanya mampu berperan kurang dari 30% dari total fasilitas yang dibutuhkan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kota-kota kecil di Kabupaten Banyumas belum secara maksimal berperan dalam menyediakan fasilitas pendukung aktivitas perdesaan.

Hasil analisis menunjukkan bahwa baru KP Purwokerto, KP Sokaraja dan KP Kembaran yang sudah mampu menyediakan lebih dari 80% fasilitas yang dibutuhkan dalam perkembangan aktivitas perdesaan. Hasil ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh dari ukuran perkotaan terhadap ketersediaan fasilitas. Semakin besar ukuran perkotaan akan semakin meningkatkan keragaman peran dari kawasan perkotaan.

Kota-kota kecil yang tumbuh dan berkembang di Kabupaten Banyumas merupakan ibukota kecamatan yang seharusnya sudah mampu

setidaknya untuk melayani wilayah kecamatannya. Namun berdasarkan analisis konteks regional yang lebih luas yakni dengan melihat kedudukan kawasan perkotaan lain menunjukkan bahwa masih banyak daerah yang belum terlayani fasilitas perkotaan. Kondisi tersebut menunjukkan diperlukan adanya peningkatan peran dan fungsi dari setiap kawasan perkotaan.

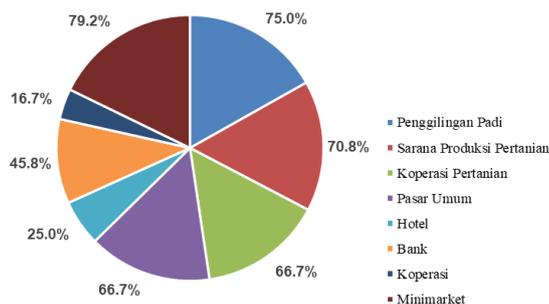
Hasil analisis potensi peningkatan peran kawasan perkotaan menunjukkan bahwa mayoritas kawasan perkotaan di Kabupaten Banyumas membutuhkan peningkatan jumlah fasilitas sebagai upaya pemenuhan kebutuhan aktivitas perdesaan. Pada **Gambar 4.** ditunjukkan bahwa masih terdapat beberapa fasilitas yang belum dapat dijangkau oleh mayoritas masyarakat di Kabupaten Banyumas. Fasilitas-fasilitas yang perlu untuk ditingkatkan yakni penggilingan padi, sarana produksi pertanian, koperasi pertanian, pasar umum, hotel, bank, koperasi, dan minimarket berdasarkan hasil analisis jangkauan pelayanan menggunakan *network analysis*.

Peran kawasan-kawasan perkotaan di Kabupaten Banyumas belum secara optimal dalam mendukung kebutuhan aktivitas perdesaan di sekitarnya. Sebagaimana menurut Kusuma & Ma'rif (2015), kota kecil memiliki fungsi sebagai penghubung antara perkotaan dengan perdesaan dan berperan dalam menyedukkan fasilitas pertanian. Selain itu NSDC (2011) juga menyatakan fungsi utama dari kota kecil adalah sebagai penyedia pelayanan bagi kawasan perdesaan dan penyeimbang laju pembangunan di daerah.

Seperti yang ditunjukkan pada **Gambar 4.** Di mana 75% kawasan perkotaan belum mampu menyediakan fasilitas penggilingan padi, 66,7% belum mampu menyediakan fasilitas koperasi pertanian dan 70,8% belum mampu menyediakan fasilitas sarana produksi pertanian. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa aktivitas pertanian yang merupakan aktivitas utama masyarakat belum mampu diakomodir dalam kawasan perkotaan.

Kawasan-kawasan Perkotaan di Kabupaten Banyumas saat ini hanya berperan sebagai pusat pelayanan umum masyarakat. Kawasan-kawasan perkotaan belum diarahkan menjadi pusat yang mendukung perkembangan aktivitas perdesaan seperti salah satunya pertanian. Fasilitas pengolahan seperti penggilingan padi masih sangat jarang ditemukan di kawasan perkotaan. Tidak tersedia sarana produksi pertanian juga menjadikan hasil

pertanian belum mampu memiliki daya jual yang tinggi.



**Gambar 4.** Grafik Persentase Kebutuhan Fasilitas dalam Upaya Peningkatan Peran Kawasan Perkotaan

Dalam konteks keterkaitan desa-kota, kawasan-kawasan perkotaan di Kabupaten Banyumas seharusnya dapat berperan tidak hanya sebagai penyedia fasilitas pendukung aktivitas perdesaan, namun juga sebagai pusat informasi dan teknologi, pusat transformasi produksi ekonomi, serta pusat peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Namun kondisi di Kabupaten Banyumas menunjukkan bahwa kawasan-kawasan perkotaan belum memiliki peran tersebut. Salah satunya ditandai dengan hanya ada 1 fasilitas khusus pengembangan talenta dan sumberdaya pertanian, yaitu SMK 1 Banyumas yang belum mampu mengakomodir kebutuhan pengembangan sumber daya manusia pertanian di Kabupaten Banyumas.

Oleh karena itu, untuk meningkatkan potensi dari kawasan-kawasan perkotaan dan memperkuat keterkaitan desa-kota, kawasan-kawasan perkotaan yang berkembang perlu diarahkan dan dikembangkan dengan penambahan dan pengembangan fasilitas-fasilitas tertentu, agar kota-kota kecil tidak saja mampu menjadi penyedia fasilitas pengolahan lanjutan dari komoditas-komoditas produksi perdesaan di sekitarnya, sebagai pusat-pusat tranformasi hasil produksi perdesaan, tetapi juga mampu menjadi pusat-pusat pengembangan talenta dan sumber daya manusia yang mampu melakukan transformasi proses dan teknologi produksi. Dengan demikian, perkembangan kota-kota kecil tersebut dapat berfungsi sekaligus sebagai pusat-pusat transformasi sosial maupun transformasi produksi dan ekonomi dari aktivitas-aktivitas perdesaan yang ada, dan mampu meningkatkan perkembangan perekonomian Kabupaten Banyumas secara keseluruhan.

## KESIMPULAN

Artikel ini memperlihatkan proses urbanisasi wilayah yang terjadi di Kabupaten Banyumas dengan menunjukkan proses perkembangan kota-kota kecil yang terjadi di dalamnya. Proses urbanisasi wilayah ini dipengaruhi oleh perkembangan desa-desa perkotaan yang ada serta perkembangan jumlah penduduk yang terdapat di dalamnya, tingkat urbanisasi wilayah, nilai kepusatan kawasan perkotaan, dan ketersediaan akses jalan.

Hasil analisis menunjukkan bahwa proses urbanisasi wilayah di kabupaten ini melibatkan dinamika perkembangan dari sebuah kawasan perkotaan sedang yang menjadi pusat konsentrasi perkotaan utama yakni Perkotaan Purwokerto, lima kawasan perkotaan kecil dengan ukuran antara 50.000 hingga 100.000 jiwa penduduk yakni Perkotaan Sokaraja, Perkotaan Banyumas, Perkotaan Kemranjen, Perkotaan Wangon, dan Perkotaan Ajibarang, dan dua puluhan perkotaan lain yang berukuran lebih kecil. Keenam kota yang pertama tersebut menjadi pusat-pusat pelayanan di Kabupaten Banyumas, dimana Kota Purwokerto tetap selalu menjadi kawasan perkotaan yang terbesar dan sekaligus menjadi pusat pelayanan utama di Kabupaten Banyumas dan sudah sesuai dengan arahan RTRW Kabupaten Banyumas.

Disisi lain Kabupaten Banyumas merupakan kawasan yang masih menjadikan aktivitas perdesaan sebagai aktivitas utama masyarakatnya. Hasil analisis menunjukkan seluruh kawasan di Kabupaten Banyumas memiliki potensi aktivitas perdesaan berupa pertanian, pariwisata, pertambangan, dan pariwisata. Kondisi alam dan ketersediaan fasilitas mendukung menjadikan adanya variasi komoditas perdesaan di setiap kawasan.

Dalam konteks keterkaitan desa kota, kota-kota kecil memiliki peran sebagai fasilitator dalam menyediakan fasilitas bagi aktivitas perdesaan di sekitarnya. Namun hasil analisis menunjukkan belum seluruh kawasan perkotaan di Kabupaten Banyumas memiliki peran tersebut. Kota-kota kecil di Kabupaten Banyumas hanya diarahkan sebagai pusat pelayanan umum dan belum diarahkan menjadi pusat transformasi dan pendukung perkembangan aktivitas perdesaan. Masih diperlukan adanya penambahan dan peningkatan fasilitas-fasilitas pendukung aktivitas perdesaan untuk dapat menjadikan kota-kota kecil memiliki peran sebagai pusat informasi dan teknologi, pusat transformasi produksi ekonomi, serta pusat peningkatan kapasitas sumber daya

manusia dari aktivitas-aktivitas produksi ekonomi perdesaan di sekitarnya.

Perkembangan kota-kota kecil di Kabupaten Banyumas dapat menjadi sebuah peluang yang tinggi bagi perkembangan wilayah Kabupaten Banyumas. Keberadaan Perkotaan Purwokerto yang berdasarkan jumlah penduduknya sudah melebihi Kota Tegal sudah mampu dikatakan layak apabila menjadi sebuah kota administratif. Selain itu dapat diketahui bahwa perkembangan perkotaan yang signifikan hanya terjadi di Perkotaan Purwokerto dan sekitarnya atau di bagian timur Kabupaten Banyumas, sementara terdapat dua kecamatan yakni Kecamatan Lumbir dan Kecamatan Gumelar yang terletak di bagian barat Kabupaten Banyumas yang belum terjangkau fasilitas dengan maksimal. Keberadaan Perkotaan Ajibarang dan Perkotaan Wangon sebagai perkotaan terdekat belum secara nyata mampu melayani kawasan dengan jangkauan yang luas karena proyek-proyek pembangunan masih banyak difokuskan di Perkotaan Purwokerto yang merupakan ibukota Kabupaten Banyumas. Kebijakan pemekaran wilayah dapat menjadi salah satu solusi adanya permasalahan ketimpangan pembangunan di Kabupaten Banyumas.

Terima kasih kami ucapkan kepada rekan-rekan Riset Dosen Mahasiswa yang telah bersama-sama berbagi pendapat dan pemikiran yang mendukung kelancaran penyusunan penelitian ini, serta ucapan terima kasih kepada para dosen penguji yang telah memberikan saran dan masukan yang positif untuk menjadikan penelitian ini lebih komprehensif, tak lupa terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam menyediakan ketengkapan data dalam penelitian ini.

## PUSTAKA

- Anjaningrum, W., & Cahyanti, M. (2017). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perkembangan Usaha Kecil Sektor Industri Pengolahan Di Kota Malang. *Jibeka*, 11(2), 73–79. <https://jurnal.stie.asia.ac.id/index.php/jibeka/article/view/50/36>
- Arsandi, A. S., R, D. W., & Ismiyati. (2017). Hubungan Pertumbuhan Penduduk dan Infrastruktur di Kota Semarang. *Jurnal Karya Teknik Sipil*, 6, 15–29. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jkts>
- Atmoko, T. P. H. (2014). Strategi Pengembangan Potensi Desa Wisata Brajan Kabupaten Sleman. *Jurnal Media Wisata*, 12(2), 146–154. <https://amptajurnal.ac.id/index.php/MWS/article/view/87>
- BPS. (2010). Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan di Indonesia. *Badan Pusat Statistik Republik Indonesia*, 13.
- Braun, J. Von. (2007). Rural-urban linkages for growth, employment, and poverty reduction. Ethiopian Economic Association Fifth International Conference on the Ethiopian Economy June 7-9, 2007 United Nations Conference Center, Addis Ababa Keynote, Plenary Session I, 22. <https://www.ifpri.org/publication/rural-urban-linkages-growth-employment-and-poverty-reduction-0>
- Fahmi, F. Z., Hudalah, D., Rahayu, P., & Woltjer, J. (2014). Extended Urbanization In Small And Medium-sized Cities: The Case of Cirebon, Indonesia. *Habitat International*, 42, 1–10. <https://doi.org/10.1016/j.habitatint.2013.10.003>
- Filipovic, M., Kanazir, V. K., & Drobnjakovic, M. (2016). Small towns in serbia - The “bridge” between the urban and the rural. *European Countryside*, 8(4), 462–480. <https://doi.org/10.1515/euco-2016-0031>
- Gaffara, G. R., Fathu, A., & Fatih. (2015). Kajian Skalogram Guttman dan Indeks Sentralitas Marshall untuk Penentuan Pusat-Pusat Pelayanan Wilayah. *Jurnal Teknik Perencanaan Wilayah Dan Kota*, 150–153. <https://journal.itny.ac.id/index.php/ReTII/article/view/177/144>
- Haryadi, H. (2010). Perkembangan dan Prospek Bahan Galian Nonlogam Indonesia. *Jurnal Teknologi Mineral Dan Batubara*, 06(4), 45–63. <https://jurnal.tekmira.esdm.go.id/index.php/minerba/article/view/879>
- Hermawati, S., & Milawaty, Y. (2016). Potensi Industri Pariwisata Kabupaten Banyumas. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, 21(3), 96961. <https://doi.org/10.35760/eb>
- Irma, A., Suasti, Y., & Febriandi. (2018). Analisa Pola dan Jangkauan Pelayanan Publik di Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu-Riau. *Buana*, 2(3), 451–465. <http://geografi.ppp.unp.ac.id/index.php/studengt/article/view/155/108>
- Jannah, T. M. (2020). Analisis Keberadaan Emas Berdasarkan Geologi dan Karakteristik Urat Hidrotermal di Daerah Cihonje, Kecamatan

- Gumelar, Kabupaten Banyumas, ., November, 0–10.
- Kanbur, R., & Zhuang, J. (2013). Urbanization and inequality in Asia. *Asian Development Review*, 30(1), 131–147. [https://doi.org/10.1162/ADEV\\_a\\_00006](https://doi.org/10.1162/ADEV_a_00006)
- Kusuma, A. M., & Ma'rif, S. (2015). Keterkaitan Antar Desa Melalui Aktivitas Agribisnis dan Industri Perdesaan Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara. *Jurnal Teknik PWK (Perencanaan Wilayah Kota)*, 4(4), 440–455. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/pwk/article/view/9806>
- Mardiansjah, F. ., Handayani, W., & Setyono, J. . (2018). Pertumbuhan Penduduk Perkotaan dan Perkembangan Pola Distribusinya pada Kawasan Metropolitan Surakarta. *Jurnal Wilayah Dan Lingkungan*, 6(3), 215. <https://doi.org/10.14710/jwl.6.3.215-233>
- Mardiansjah, F. ., & Rahayu, P. (2020). *Perkembangan Kawasan Perkotaan Kecil di Pinggiran Kota Pekalongan*. 20, 151–168. <https://ejournal.upi.edu/index.php/gea/article/view/25842/13225>
- Mardiansjah, F. H., Rahayu, P., & Rukmana, D. (2021). New Patterns of Urbanization in Indonesia: Emergence of Non-statutory Towns and New Extended Urban Regions. *Environment and Urbanization ASIA*, 12(1), 11–26. <https://doi.org/10.1177/0975425321990384>
- Pohan, M. P., Denni, W., Sabtando, J. S., & Asep, A. (2007). Penyelidikan Potensi Bahan Galian Pada Tailing PT Freeport Indonesia Di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua. *Proceeding Pemaparan Hasil Kegiatan Lapangan Dan Non Lapangan Tahun 2007 Pusat Sumber Daya Geologi*. <http://psdg.bgl.esdm.go.id/kolokium2007/KONSERVASI/Prosiding.PT.FI.pdf>
- Pratomo, R. A., & Wijayanti, W. P. (2019). Keberlanjutan Wilayah: Keterkaitan Desa-Kota Dalam Aktivitas Minapolitan Di Kabupaten Malang. *Journal of Regional and Rural Development Planning (Jurnal Perencanaan Pembangunan Wilayah Dan Perdesaan)*, 3(3), 180–188. <https://doi.org/10.29244/jp2wd.2019.3.3.180-188>
- Rachmawati, E., & Amir. (2007). Studi Potensi Industri Kecil di Desa Tertinggal Dalam Rangka Pemberdayaan Pengusaha Kecil di Kabupaten Banyumas. *Media Ekonomi Universitas Muhammadiyah Purwokerto*, 7(1), 1–17. <https://media.neliti.com/media/publications/29588-ID-studi-potensi-industri-kecil-di-desa-tertinggal-dalam-rangka-pemberdayaan-pengus.pdf>
- Rahayu, D. I. (2016). Analisis Komoditas Unggulan Pangan Kabupaten Banyumas. *Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan)*, 1(1), 35–46. <https://jurnal.untidar.ac.id/index.php/REP/article/view/51>
- Satterthwaite, D., McGranahan, G., & Tacoli, C. (2010). Urbanization and its implications for food and farming. *Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences*, 365(1554), 2809–2820. <https://doi.org/10.1098/rstb.2010.0136>
- Setyono, J. S., Yunus, H. S., & Giyarsih, S. R. (2016). The Spatial Pattern of Urbanization and Small Cities Development in Central Java: a Case Study of Semarang-Yogyakarta-Surakarta Region. *Geoplanning: Journal of Geomatics and Planning*, 3(1), 53–66. <https://doi.org/10.14710/geoplanning.3.1.53-66>
- Sietchiping, R., Kago, J., Zhang, X. Q., Tuts, R., & Reid, J. (2014). The role of small and intermediate towns in enhancing urban-rural linkages for sustainable urbanization. *Regional Development Dialogue*, 35(March 2019), 48–62.
- Tacoli, C. (2017). Why Small Towns Matter: Urbanisation, Rural Transformation And Food Security. *International Institute for Environment and Development*, 12. <https://pubs.iied.org/10806iied>
- UNDESA. (2018). World Urbanization Prospects. In *Demographic Research* (Vol. 12). <https://population.un.org/wup/Publications/Files/WUP2018-Report.pdf>
- Yue, W., Liu, Y., & Fan, P. (2013). Measuring Urban Sprawl And Its Drivers In Large Chinese Cities: The Case of Hangzhou. *Land Use Policy*, 31, 358–370. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2012.07.018>